



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DP2KBP3A 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN SUMBAWA

Alamat : Jln. Durian Nomor 75 Sumbawa Besar

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan tuhan Yang Maha Esa, karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa Besar, Februari 2024

Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



JANNATULFALA, S.AP

NIP. 19640719 198503 2 005

Daftar Isi

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Gambar		iii
Daftar Lampiran		iv
Ikhtisar eksekutif		v
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A		2
1.3. Issu Strategis		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA		10
2.1 Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026		10
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2021		12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi		16
BAB IV PENUTUP		39
LAMPIRAN		

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	3
Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa	4

Daftar **L**ampiran

1. Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang IKU DP2KBP3A
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan
4. Perjanjian Kinerja Berjenjang
5. Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Rencana Kinerja Tahunan Perubahan
8. Capaian Kinerja RKT Tahun 2023
9. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
10. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Perubahan Tahun 2023
11. Capaian Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
12. Matrik Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2023
13. Capaian Kinerja Program / Kegiatan Tahun 2023

Ikhtisar Eksekutif

Salah satu azas umum penyelenggaraan negara adalah akuntabilitas. Azas akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah yang dijalankan, dalam konteks penerapan tata pemerintahan yang baik mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. lebih lanjut berdasarkan Perpres 29 tahun 2014 mengisyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa ini disusun.

LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2023 ini menyajikan berbagai capaian kinerja sebagai kebutuhan untuk analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Capaian-capaian kinerja yang tergambar dari ukuran indikator-indikator kinerja sasaran sesungguhnya merupakan kinerja seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaporkan capaian kinerja selama Tahun 2023 dikaitkan dengan Rencana Kinerja 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2023, selama periode ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa melaksanakan **80 Sub Kegiatan dalam 27 Kegiatan dan 10 Program** untuk memenuhi **5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran strategis**. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp. 21.350.847.912,00 meliputi Belanja Pegawai Rp. 7.486.548.733,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.031.458.899,00; dan Belanja Modal Rp. 1.832.840.280,00.

Baik secara parsial dan simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan tolok ukur dan target kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dapat dikatakan berhasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada kepala Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, perangkat daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra PD, Renja PD, PK, dan RKT.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Untuk memastikan keseluruhan program, dan kegiatan pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dapat terlaksana sesuai dengan target waktu, Kuantitas dan kualitas sasaran, maka dibuatlah perjanjian antara kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa dengan Bupati, dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu pegawai yang tertuang dalam

perjanjian kinerja. Sehingga Setiap penyelenggara negara dan pemerintah mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan, serta setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melaksanakan dua tugas pokok yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

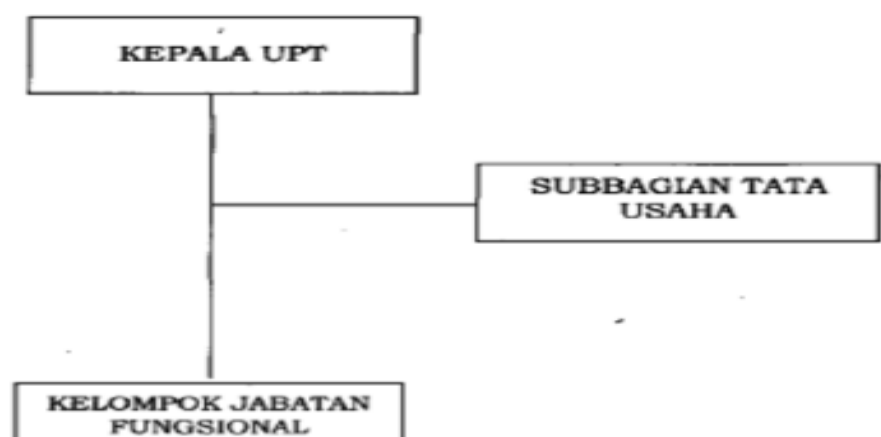
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas :

- Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
- kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - a. Perencana Ahli Muda, dan
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan terdiri atas kelompok jabatan fungsional yaitu :
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
- b. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
 - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.
- c. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
 - Analis Kebijakan Ahli Muda;
- e. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) terdiri atas:
 - Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

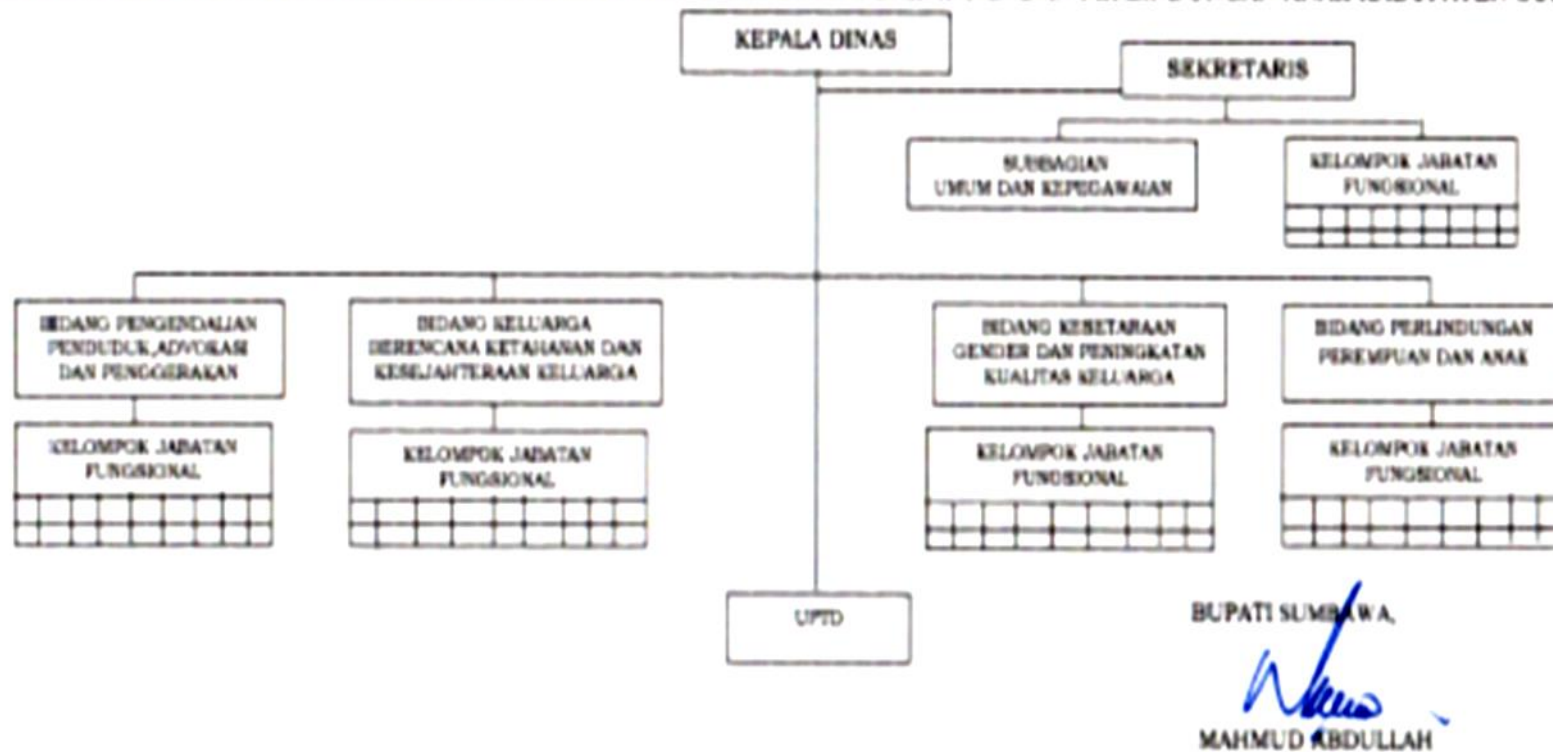
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 63 TAHUN
2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari sekretaris dan kepala bidang pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
3. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk, data kependudukan serta advokasi dan penggerakan; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan kesertaan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak serta menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
2. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, Adapun tugas dan fungsi unit pelaksana teknis berdasarkan peraturan bupati tersebut adalah sebagai berikut :

a. UPT KB dan PPPA

Tugas dari kepala unit pelaksana teknis KB dan PPPA melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis keluarga berencana menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana
2. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
3. Penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
4. Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
5. Pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
6. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. UPTD PPA

Tugas dari kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT perlindungan perempuan dan anak
2. Menyusun program kerja UPT perlindungan perempuan dan anak
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus
4. Mengevaluasi hasil kerja UPT perlindungan perempuan dan anak

5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT perlindungan perempuan dan anak
 6. Melaksanakan administrasi UPT perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sebagai berikut :

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Pengendalian penduduk	1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tergantung dari pemerintah pusat	1. Kepadatan penduduk antar kecamatan belum proposional
2.	Keluarga Berencana	2. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	2. Masih kurangnya pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam penyadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga melalui program KB
3.	Keluarga Sejahtera	3. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3. Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan
4.	Perlindungan perempuan dan anak	4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
5.	Kualitas keluarga,	5. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	5. Masih rendahnya kualitas kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender
6.	Perlindungan khusus anak	6. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak masih rendah

Tabel 1.1. Permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dirumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan dua (2) urusan yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa.

2.1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban, yang dilaksanakan melalui 4 Misi yaitu :

- (1) Sumbawa Sehat dan Cerdas dengan Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan,

- (2) Sumbawa Sejahtera dan Mandiri dengan Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata,
- (3) Sumbawa Bersih dan Melayani dengan Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efisien,
- (4) Sumbawa Aman dan Berbudaya dengan Mewujudkan masyarakat yang beriman, berakarakter, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

a. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026 seperti terlihat dalam tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kesehatan (AHH)
		Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)
			Peningkatan Jumlah Pengeluaran Perkapita (yang disesuaikan)
		Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera
			Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A
			Indeks Pembangunan Gender
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD
			Hasil Pengukuran Kabupaten Layak Anak
		Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa, maka dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan

mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kesehatan serta kualitas perempuan dan anak dengan peningkatan layanan pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Penguatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Penguatan kebijakan dan regulasi	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2023

Untuk dapat mengukur kinerja sebuah organisasi perlu ditetapkan target kinerja organisasi yang akan digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026. Sesuai dengan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, maka Penetapan Kinerja pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Persen	2.78
Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	87
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A	Kategori Nilai	BB
Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Persen	12
Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persen	7,48

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2023

Target kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang merupakan target pencapaian organisasi Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun ketiga pencapaian Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Capaian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2023 diukur berdasarkan tingkat capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berecana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sumbawa bahwa terdapat 5 sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu:

- 1). Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dengan indikator kinerja utama yaitu Angka Kelahiran Total (TFR),
- 2). Meningkatnya persentase keluarga sejahtera dengan indikator kinerja utama adalah Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera,
- 3). Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama yaitu Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas P2KBP3A,
- 4). Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah dengan indikator kinerja utama adalah Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD, dan
- 5). Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak dengan indikator kinerja utama adalah Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya.

Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan / atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian sasaran strategis kinerja utama Dinas P2KBP3A pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,78	2,39	85,97
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	%	87,00	85,01	97,71
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	100
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	%	12,00	47,13	392,79
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	7,48	-0,56	-7,53
Rata-Rata			%			91,84
Tertinggi			%			97,71
Terendah			%			85,97

Terhadap IKU, pengukuran capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	$TFR = \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	Keluarga Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari segi ekonomi social dan budaya	$\text{Persentase Keluarga Sejahtera} = \frac{\text{Jumlah Keluarga Sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga (KK)}} \times 100$
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda.	$\text{Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD} = \frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100$
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan	$\text{Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak} = \frac{\text{Hasil Pengukuran KLA (T.n)} - \text{Hasil Pengukuran KLA (T.n-1)}}{\text{Hasil Pengukuran KLA (T.n)}} \times 100$

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja IKD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,78	2,39	85,97	Tinggi
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	%	87	85,01	97,71	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	%	12	47,13	392,79	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	7,48	-0,56	-7,53	Rendah
Capaian Rata-Rata			%			91,84	
Capaian Tertinggi			%			97,71	
Capaian Terendah			%			85,97	

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun n dengan tahun n-1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun n-1 (2022)	Capaian Tahun n (2023)	Naik (+)/ Turun (-)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,34	2,39	0,05
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	%	82,84	85,01	2,17
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	A	BB	-8,96
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	%	31,84	47,13	15,30
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	17,64	-0,56	-18,20

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Tahun Akhir	Realisasi Tahun n (2023)	Keterangan	
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,76	2,39	0,37	Tercapai
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	%	89,00	85,01	-3,99	Belum Tercapai
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	A	BB	-8,96	Belum Tercapai
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	%	14,00	47,13	33,13	Tercapai
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	75,00	-0,56	-75,56	Belum Tercapai

e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2023)	Realisasi PemProv Tahun n (2023)	Target Nasional Tahun n (2023)	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,39	2,39	2,14	
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	%	85,01	-	-	Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja provinsi dan nasional
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	Kategori	BB	BB	BB	
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	%	47,13	1,79	81,85	
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	%	-0,56	-	-	Tidak dilakukan perbandingan terhadap realisasi kinerja provinsi dan nasional
Rata-Rata				43,70	1,20	1,07	
Tertinggi				85,01	2,39	2,14	
Terendah				2,39	0,00	0,00	

f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,39	1	Angka ber-KB yang tidak terpenuhi	1 Menurunkan angka ber-KB yang tidak terpenuhi dengan meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
				2	Peran/fungsi penyuluh lapangan KB (PLKB) belum optimal, baik dari kuantitas maupun kualitasnya	2 Optimalisasi peran tenaga lini lapangan dalam penurunan unmeet need melalui penajaman sasaran unmetneed by name by address untuk diberikan KIE KB.
				3	Tingkat pelayanan KB pasca persalinan masih rendah	4 Meningkatkan KB pascapersalinan untuk menjaga jarak kelahiran melalui pendampingan ibu hamil oleh PKB/PLKB, PPKBD dan sub PPKBD;
				4	Masih terjadinya perkawinan usia muda	5 Meningkatkan promosi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan berkeluarga bagi remaja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
2	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	85,01	1	Belum semua peserta KB dari kelompok masyarakat miskin mendapat penguatan untuk peningkatan kesejahteraan	1	Merencanakan sosialisasi dan pendampingan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	1	Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Sumbawa Tahun 2023 atas kinerja tahun 2022 menggunakan permenpan RB No.88 Tahun 2021 dengan 4 (empat) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, sedangkan LKjIP PD yang disusun serta target yang dirumuskan masih berpedoman pada Permenpan RB No.12 Tahun 2015, dengan 5 (lima) komponen/sub komponen/kriteria penilaian, hal itulah yang menyebabkan penurunan realisasi kinerja	1	Menyusun LKjIP perangkat daerah tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru
4	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	47,13	1	Perencanaan dan penganggaran responsif gender baru menjadi kepedulian beberapa unit kerja dan belum menyeluruh	1	Pendampingan penyusunan PPRG kepada seluruh perangkat daerah
				2	Adanya keterbatasan pengetahuan aparaturnya pada perangkat daerah	2	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan PPRG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi	
5	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	-0,56	1	Kelembagaan KLA di level kabupaten belum sepenuhnya dapat berjalan, seperti di dalam internal kelembagaan itu sendiri belum berjalan koordinasi yang baik antar OPD yang merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA.	1	Meningkatkan peran Bappeda sebagai ketua Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan koordinasi antar OPD yang tergabung di dalam Gugus Tugas KLA
				2	Masih banyak aturan yang belum terbentuk untuk mendukung terwujudnya KLA		Menyusun dan mengusulkan rancangan pembentukan regulasi yang menunjang terwujudnya KLA
				3	Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan klaster belum maksimal. Hal ini ditunjukkan pencapaian tiap-tiap klaster belum terpenuhi secara keseluruhan dan masih dibawah target rencana pencapaian yang telah ditetapkan.		Melakukan pemetaan terhadap hak anak yang belum terpenuhi berdasarkan klaster dan melakukan advokasi kepada instansi dan stakeholder terakit untuk penuhannya dan disertai data dukung yang valid.
				4	Belum optimalnya SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA) Peran Lembaga Masyarakat, OPD lain, Dunia Usaha dan Media Massa		Melakukan refresing terhadap tenaga yang pernah dilatih konvensi hak anak dan melakukan pelatihan untuk yang belum pernah mendapatkan pelatihan konvensi hak anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Analisis Penyebab Tingkat Capaian		Alternatif Solusi/Strategi
				5	Keikutsertaan perwakilan anak dalam forum musrenbang hanya seremonial, sementara suara anak dalam forum musrenbang belum dapat di realisasikan secara nyata	Melakukan advokasi untuk terkait pemenuhan aspirasi atau suara anak yang di sampaikan dalam forum musrenbang

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun n

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTRA A	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
1	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)		9.360.833.100	9.360.833.100	9.209.139.175	100,00	98,38	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.241.105.000	1.241.105.000	1.217.842.750	100,00	98,13	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kabu/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk	54.150.000	54.150.000	46.950.000	100,00	86,70	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	39.870.000	39.870.000	35.550.000	100,00	89,16	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	14.280.000	14.280.000	11.400.000	100,00	79,83	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah	1.186.955.000	1.186.955.000	1.170.892.750	100,00	98,65	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6.255.000	6.255.000	4.335.000	100,00	69,30	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	64.190.000	100,00	99,98	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12.000.000	12.000.000	10.550.000	100,00	87,92	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	252.100.000	252.100.000	246.180.000	100,00	97,65	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	846.130.000	846.130.000	839.367.750	100,00	99,20	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan PeLap Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6.270.000	6.270.000	6.270.000	100,00	100,00	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	4.144.666.000	4.144.666.000	4.047.961.850	100,00	97,67	
		Persentase Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern (MCPR)	3.975.062.100	3.975.062.100	3.943.334.575	100,00	99,20	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	1.879.356.000	1.879.356.000	1.783.153.100	100,00	94,88	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	162.614.000	162.614.000	162.014.000	100,00	99,63	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	140.070.000	100,00	93,38	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Mimilok	312.260.000	312.260.000	280.216.000	100,00	89,74	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1.173.886.000	1.173.886.000	1.120.257.100	100,00	95,43	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK	80.596.000	80.596.000	80.596.000	100,00	100,00	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTR A	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	508.130.000	508.130.000	508.068.750	100,00	99,99	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	508.130.000	508.130.000	508.068.750	100,00	99,99	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	3.975.062.100	3.975.062.100	3.943.334.575	100,00	99,20	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.950.100	49.950.100	40.160.100	100,00	80,40	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.839.150.000	1.839.150.000	1.821.284.000	100,00	99,03	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	21.130.000	21.130.000	19.680.000	100,00	93,14	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.015.620.000	2.015.620.000	2.013.038.475	100,00	99,87	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.592.000	21.592.000	21.592.000	100,00	100,00	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	22.390.000	22.390.000	22.350.000	100,00	99,82	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	5.230.000	5.230.000	5.230.000	100,00	100,00	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1.757.180.000	1.757.180.000	1.756.740.000	100,00	99,97	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.234.660.000	1.234.660.000	1.234.220.000	100,00	99,96	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	522.520.000	522.520.000	522.520.000	100,00	100,00	Kabid Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan
2	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera		3.141.030.548	3.141.030.548	2.520.342.500	100,00	80,24	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan Angka Keluarga Pra Sejahtera	2.971.643.000	2.971.643.000	2.357.005.000	100,00	79,32	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	2.971.643.000	2.971.643.000	2.357.005.000	100,00	79,32	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.130.000	360.130.000	359.430.000	100,00	99,81	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11.730.000	11.730.000	11.180.000	100,00	95,31	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.576.363.000	2.576.363.000	1.962.975.000	100,00	76,19	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTRA	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	17.800.000	17.800.000	17.800.000	100,00	100,00	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)	5.620.000	5.620.000	5.620.000	100,00	100,00	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Kualitas Keluarga	169.387.548	169.387.548	163.337.500	100,00	96,43	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	107.582.548	107.582.548	104.657.500	100,00	97,28	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	78.957.548	78.957.548	78.677.500	100,00	99,65	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	17.170.000	17.170.000	16.225.000	100,00	94,50	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	11.455.000	11.455.000	9.755.000	100,00	85,16	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	61.805.000	61.805.000	58.680.000	100,00	94,94	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	61.805.000	61.805.000	58.680.000	100,00	94,94	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
3	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBPA		8.097.452.238	8.097.452.238	7.843.419.114	100,00	96,86	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	8.097.452.238	8.097.452.238	7.843.419.114	100,00	96,86	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	49.074.488	49.074.488	45.585.720	100,00	92,89	
	Penyusunan Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	32.444.200	32.444.200	29.092.140	100,00	89,67	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1.879.780	1.879.780	1.855.000	100,00	98,68	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1.326.600	1.326.600	1.321.600	100,00	99,62	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1.641.280	1.641.280	1.640.000	100,00	99,92	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1.261.600	1.261.600	1.257.600	100,00	99,68	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.233.000	4.233.000	4.221.900	100,00	99,74	Sekretaris
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	6.288.028	6.288.028	6.197.480	100,00	98,56	Sekretaris
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.538.501.507	7.538.501.507	7.336.484.951	100,00	97,32	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.442.098.107	7.442.098.107	7.241.531.551	100,00	97,30	Sekretaris
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.970.000	81.970.000	80.520.000	100,00	98,23	Sekretaris
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.790.000	3.790.000	3.790.000	100,00	100,00	Sekretaris
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.891.600	2.891.600	2.891.600	100,00	100,00	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.141.200	2.141.200	2.141.200	100,00	100,00	Sekretaris
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.190.000	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00	Sekretaris
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.725.600	1.725.600	1.725.600	100,00	100,00	Sekretaris
	Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.695.000	1.695.000	1.695.000	100,00	100,00	Sekretaris

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikator RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTRA A	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.864.548	126.864.548	122.056.527	100,00	96,21	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.460.548	2.460.548	2.460.548	100,00	100,00	Sekretaris
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.400.000	2.400.000	1.170.000	100,00	48,75	Sekretaris
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitas Kunjungan Tamu	5.720.000	5.720.000	3.735.000	100,00	65,30	Sekretaris
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.284.000	116.284.000	114.690.979	100,00	98,63	Sekretaris
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	48.873.000	48.873.000	48.728.000	100,00	99,70	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48.873.000	48.873.000	48.728.000	100,00	99,70	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.218.095	140.218.095	110.682.720	100,00	78,94	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.247.095	29.247.095	26.346.800	100,00	90,08	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	90.730.000	90.730.000	65.694.920	100,00	72,41	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20.241.000	20.241.000	18.641.000	100,00	92,10	Sekretaris
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.920.600	193.920.600	179.881.196	100,00	92,76	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.854.600	40.854.600	38.634.380	100,00	94,57	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	142.956.000	142.956.000	131.136.816	100,00	91,73	Sekretaris
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.110.000	10.110.000	10.110.000	100,00	100,00	Sekretaris
4	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD		297.644.500	297.644.500	269.432.615	100,00	90,52	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Persentase PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	81.430.000	81.430.000	78.285.000	100,00	96,14	
		Peningkatan Persentase Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor poleksosbud	34.790.000	34.790.000	34.790.000	100,00	100,00	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	46.640.000	46.640.000	43.495.000	100,00	93,26	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	16.025.000	16.025.000	15.460.000	100,00	96,47	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	10.150.000	10.150.000	10.050.000	100,00	99,01	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	8.065.000	8.065.000	7.465.000	100,00	92,56	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	12.400.000	12.400.000	10.520.000	100,00	84,84	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	25.965.000	25.965.000	25.965.000	100,00	100,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	25.965.000	25.965.000	22.165.000	100,00	85,36	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan daerah	8.825.000	8.825.000	8.825.000	100,00	100,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	8.825.000	8.825.000	8.825.000	100,00	100,00	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTRA	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	181.424.500	181.424.500	156.357.615	100,00	86,18	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	55.990.000	55.990.000	55.989.800	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	55.990.000	55.990.000	55.989.800	100,00	100,00	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan perempuan yang terlayani	84.154.500	84.154.500	60.537.815	100,00	71,94	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	84.154.500	84.154.500	60.537.815	100,00	71,94	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	41.280.000	41.280.000	39.830.000	100,00	96,49	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41.280.000	41.280.000	39.830.000	100,00	96,49	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak		524.466.900	524.466.900	470.410.115	100,00	89,69	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	21.890.000	21.890.000	20.095.000	100,00	91,80	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Penginputan data sistem SIGA dan SIMPONI	21.890.000	21.890.000	20.095.000	100,00	91,80	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	9.755.000	9.755.000	8.755.000	100,00	89,75	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	12.135.000	12.135.000	11.340.000	100,00	93,45	Kabid Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Persentase Pemenuhan Indikator KLA	147.301.400	147.301.400	146.617.372	100,00	99,54	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	45.603.400	45.603.400	45.311.180	100,00	99,36	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27.336.000	27.336.000	27.256.300	100,00	99,71	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	18.267.400	18.267.400	18.054.880	100,00	98,84	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	101.698.000	101.698.000	101.306.192	100,00	99,61	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	16.100.000	16.100.000	16.100.000	100,00	100,00	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	28.955.000	28.955.000	28.593.192	100,00	98,75	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	7.035.000	7.035.000	7.035.000	100,00	100,00	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	49.608.000	49.608.000	49.578.000	100,00	99,94	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RENSTRA Tahun 2023 (Rp)	DPPA 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	% DPPA - RENSTRA A	% Realisasi - Alokasi	Pelaksana Program
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penurunan Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan	355.275.500	355.275.500	303.697.743	100,00	85,48	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	89.841.000	89.841.000	87.930.000	100,00	97,87	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PD yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	35.871.000	35.871.000	34.090.000	100,00	95,03	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	53.970.000	53.970.000	53.840.000	100,00	99,76	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan anak yang terlayani	190.838.500	190.838.500	141.578.579	100,00	74,19	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	19.860.000	19.860.000	15.540.000	100,00	78,25	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	170.978.500	170.978.500	126.038.579	100,00	73,72	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	74.596.000	74.596.000	74.189.164	100,00	99,45	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	74.596.000	74.596.000	74.189.164	100,00	99,45	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Penurunan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,39	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kabu/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2,00	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	1,00	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Daerah	6,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	14,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3,00	
	Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan PeLap Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,57	
		Persentase Capaian Kinerja Pemakaian kontrasepsi Modern (MCPR)	70,53	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	75,36	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20,00	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	10,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24,00	
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK	3,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	23,64	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	960,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12,00	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3249,00	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4,00	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	34,00	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34,00	
	Meningkatnya Persentase Keluarga Sejahtera	Peningkatan Persentase Keluarga Sejahtera	85,01	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penurunan Angka Keluarga Pra Sejahtera	16,71	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	26,11	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20,00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1176,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1,00	
	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	60,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Kualitas Keluarga	68,97	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	3,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	25,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	4,00	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1,00	
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas P2KBP3A	BB	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai AKIP PD	72,83	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	7,00	
	Penyusunan Dok Perencanaan PD	Jumlah Dok Perencanaan PD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA- SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	1,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	586,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	3,00	
	Penyusunan PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21,00	
	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15,00	
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Daerah	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	47,13	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Persentase PD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender melalui APBD	53,57	
		Peningkatan Persentase Perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor poleksosbud	0,06	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilatih PUG	39,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	1,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	1,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	40,00	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	40,00	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	90,00	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	3,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan daerah	1,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	4,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan Rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5,28	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	2,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan perempuan yang terlayani	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	6,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	12,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	65,00	
	Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	Persentase peningkatan Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak	-0,56	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,00	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Tingkat Penginputan data sistem SIGA dan SIMPONI	100,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	2,00	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	2,00	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Persentase Pemenuhan Indikator KLA	50,30	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	10,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	0	2,00	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	2,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	3,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penurunan Persentase Anak Korban Tindak Kekerasan	0,03	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1,00	

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Sasaran Strategis / Program	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah PD yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	6,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	2,00	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Cakupan korban kekerasan anak yang terlayani	100,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	41,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	6,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	2,00	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam pelaksanaan pembangunan melalui sasaran yang tertuang di dalam Rencana Kerja. Laporan ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan terhadap Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tahun Anggaran 2023. Hasil pengukuran kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa pada tahun 2023 masuk dalam kategori berhasil.

LKjIP ini merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini kami menyajikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti yang diharapkan dan semoga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dalam penyempurnaan pelaporan kinerja ini di masa yang akan datang.

Besar harapan kami bahwa LKjIP Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita ke depan untuk membangun Kabupaten Sumbawa ini dengan lebih gemilang yang berkeadaban.

LAMPIRAN